

## PENYUSUNAN ROADMAP SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022-2026

### DEVELOPMENT OF ROADMAP OF REGIONAL INNOVATION SYSTEM (SIDA) BANDUNG REGENCY, 2022-2026

**Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Kab Bandung**  
email: litbangbandungkab@gmail.com

#### *Abstract*

*The innovation system is one approach to economic development by utilizing science and technology that can provide added value. Strengthening the innovation system is carried out to support progressive and quality, inclusive and sustainable national and regional development. Strengthening the Regional Innovation System (SIDa) is realized to support the strengthening of the National Innovation System. Strengthening SIDa is a vehicle for strengthening the pillars of the development of creativity and innovation in the regions which are an integral part of the Strengthening of the National Innovation System. To ensure the sustainability of the implementation of the SIDa strengthening policy, the SIDa Strengthening policy must be included in the regional five-year strategic plan, namely the SIDa Strengthening Roadmap, the Regional Medium Term Development Plan (RPJMD), and the Regional Government Work Plan (RKPD). The SIDa Strengthening Roadmap itself contains SIDa's current condition, challenges and opportunities, conditions to be achieved, policy directions and strengthening strategies, focus and priority programs, and action plans for SIDa strengthening. The obstacle that often arises in the implementation of SIDa is the number of development programs that are still routinely oriented, sporadic, and partial. Each regional apparatus only puts forward programs that are directly related to the authority and does not think about the link between these programs and other programs which are cross-authorities between regional apparatuses. Therefore, the preparation of the Bandung Regency Regional Innovation System Roadmap (SIDa) is very important in regulating and directing the formation of conducive and harmonious environmental conditions in encouraging the creation of collaboration and innovation that is beneficial in improving development achievements.*

**Keywords:** *roadmap, regional innovation system, Bandung Regency*

#### **Abstrak**

Sistem inovasi merupakan salah satu pendekatan pembangunan ekonomi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat memberikan nilai tambah (added value). Penguatan sistem inovasi dilaksanakan untuk mendukung pembangunan nasional dan daerah yang progresif dan berkualitas, inklusif dan berkelanjutan. Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) diwujudkan untuk menunjang penguatan Sistem Inovasi Nasional. Penguatan SIDa merupakan wahana dalam memperkuat pilar-pilar penumbuhkembangan kreativitas dan inovasi di daerah yang menjadi bagian integral dari Penguatan Sistem Inovasi Nasional. Untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan kebijakan penguatan SIDa, maka kebijakan Penguatan SIDa harus tercantum dalam rencana strategis lima tahunan daerah, yaitu dalam Roadmap Penguatan SIDa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Roadmap Penguatan SIDa sendiri memuat kondisi SIDa saat ini, tantangan dan peluang, kondisi yang akan dicapai, arah kebijakan dan strategi penguatan, fokus dan program prioritas, serta rencana aksi penguatan SIDa. Kendala yang sering muncul dalam implementasi SIDa adalah banyaknya program-program pembangunan yang masih berorientasi pada rutinitas, sporadis, dan parsial. Masing-masing perangkat daerah hanya mengedepankan program yang terkait langsung dengan kewenangan dan



tidak memikirkan kaitan program tersebut dengan program lainnya yang merupakan lintas kewenangan antar perangkat daerah. Oleh karena itu penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Bandung menjadi sangat penting dalam mengatur dan mengarahkan terbentuknya kondisi lingkungan yang kondusif dan harmonis dalam mendorong terciptanya kolaborasi dan inovasi yang bermanfaat dalam meningkatkan capaian pembangunan.

**Kata kunci:** roadmap, sistem inovasi daerah, Kabupaten Bandung

## A. PENDAHULUAN

Sistem inovasi merupakan salah satu pendekatan pembangunan ekonomi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat memberikan nilai tambah (added value). Sistem inovasi tidak hanya berfokus pada aspek penciptaan teknologi (technology pull) atau kebutuhan teknologi (technology push) semata namun merupakan pendekatan sistemik yang menekankan pada keterkaitan (integrasi) antara pelaku inovasi maupun pelaku pembangunan. Taufik (2005) mendeskripsikan sistem inovasi sebagai kesatuan dari sehimpunan aktor, kelembagaan, hubungan, jaringan, interaksi, dan proses produktif, yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan difusi inovasi.

Penguatan sistem inovasi dilaksanakan untuk mendukung pembangunan nasional dan daerah yang progresif dan berkualitas, inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, maka tujuan pokok penguatan sistem inovasi yaitu meningkatkan kemampuan Bangsa dan Negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (basic needs) dan melindungi kepentingan masyarakat (public interest). Kemudian mendukung percepatan peningkatan daya saing (competitiveness) dan penguatan kohesi sosial (social cohesion). Dan yang terakhir mendukung kemandirian Bangsa dan menjaga kedaulatan NKRI (sovereignty). Dalam kaitan ini, penguatan sistem inovasi akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, baik pada tingkat nasional maupun daerah, karena secara tidak langsung akan meningkatkan daya saing nasional maupun daerah yang berujung pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat

Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) diwujudkan untuk menunjang penguatan Sistem Inovasi Nasional. Penguatan SIDa merupakan wahana dalam memperkuat pilar-pilar penumbuhkembangan kreativitas dan inovasi di daerah yang menjadi bagian integral dari Penguatan Sistem Inovasi Nasional. Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, yang pada gilirannya diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah. Dengan demikian, penguatan SIDa menjadi bagian penting dalam percepatan pembangunan daerah.

Dalam konteks daerah, sistem inovasi ini juga dinilai sangat penting dalam menentukan sumber keunggulan daya saing, misalnya kesalingbergantungan (yang tak dapat ditukar) yang menghasilkan knowledge spillover, berkembangnya jaringan, yang pada dasarnya akan efektif jika terbangun kondisi saling percaya, serta modal sosial (social capital), baik dalam pengertian faktor-faktor historis dan kultural daerah termasuk norma-norma (communitarian) maupun faktor positif yang berkembang karena interaksi berbagai pihak dalam aktivitas sosial ekonomi yang saling terkait (performance based) sehingga mendorong rasa saling percaya, saling mengerti, dan saling terbuka.

Bersama Kementerian Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Kementerian Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Dalam peraturan bersama tersebut dijelaskan bahwa Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan

inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah. Adapun ruang lingkup penguatan SIDA meliputi kebijakan penguatan SIDA, penataan unsur SIDA, dan pengembangan SIDA.

Untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan kebijakan penguatan SIDA, maka kebijakan Penguatan SIDA harus tercantum dalam rencana strategis lima tahunan daerah, yaitu dalam Roadmap Penguatan SIDA, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Roadmap Penguatan SIDA sendiri memuat kondisi SIDA saat ini, tantangan dan peluang, kondisi yang akan dicapai, arah kebijakan dan strategi penguatan, fokus dan program prioritas, serta rencana aksi penguatan SIDA. Pada intinya, Roadmap Penguatan SIDA mengakomodasi seluruh program dan kegiatan yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

Penyusunan roadmap harus bersifat bottom up untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan potensial yang akan dipecahkan dan dikombinasikan dengan pendekatan top down melalui hasil-hasil kajian dan pemikiran para pakar, akademisi, peneliti, serta praktisi yang nantinya menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan.

Kendala yang sering muncul dalam implementasi SIDA adalah banyaknya program-program pembangunan yang masih berorientasi pada rutinitas, sporadis, dan parsial. Masing-masing perangkat daerah hanya mengedepankan program yang terkait langsung dengan kewenangan dan tidak memikirkan kaitan program tersebut dengan program lainnya yang merupakan lintas kewenangan antar perangkat daerah. Ini menunjukkan belum terbangunnya semangat ke arah sinergitas dan integrasi. Masing-masing perangkat daerah ingin menunjukkan kinerja organisasinya dan lebih berorientasi pada hirarki struktural. Belum ada kerangka konsep yang mampu mengarahkan kerja kolaboratif dalam suatu sistem dan aspek hilirisasi dan aglomerasi pembangunan. Implementasi penguatan SIDA pun belum seragam di semua daerah. Sebagian memiliki cara pandang bahwa SIDA hanya berfokus pada klaster industri. Disisi lain ada yang memandang SIDA sebatas produk berupa komoditi unggulan tertentu dalam kawasan tertentu atau one village one product.

Paradigma SIDA yang harus dibangun adalah sebuah sistem yang mencakup hierarki antar sektor yang mampu berkolaborasi secara terintegrasi dalam kerangka konsep pembangunan yang memenuhi asumsi hilirisasi, aglomerasi, multidimensional, berkelanjutan, serta berdaya saing. Karena itu, cara pandang terhadap Roadmap Penguatan SIDA ini harus bersifat multi dimensional, melalui pemetaan zonasi ekonomi, sains dan teknologi, sosial budaya, terintegrasi dengan kawasan strategis dan pariwisata, serta penempatan ruang publik kreatif yang tepat sasaran sesuai dengan karakteristik potensi kewilayahan dan tersistem, sehingga diharapkan dapat menjamin terjadinya sistem hilirisasi klaster industri yang akan diangkat dalam SIDA (Taufik, 2005).

Oleh karena itu penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Bandung menjadi sangat penting dalam mengatur dan mengarahkan terbentuknya kondisi lingkungan yang kondusif dan harmonis dalam mendorong terciptanya kolaborasi dan inovasi yang bermanfaat dalam meningkatkan capaian pembangunan. Melalui dokumen Roadmap SIDA, diharapkan potensi-potensi lokal di Kabupaten Bandung dapat diidentifikasi untuk selanjutnya dikembangkan secara inovatif untuk memperoleh outcome yang optimal dan berkelanjutan melalui kolaborasi antar pelaku pembangunan sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



## B. METODE PENELITIAN

Kajian ini adalah merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Dalam penelitian deskriptif ditujukan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang di teliti. Penelitian ini khusus membahas tentang inovasi setiap daerah yang ada di wilayah administrasi Kabupaten Bandung sebagai upaya penguatan daya saing daerah Kabupaten Bandung.

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Agar dalam penelitian ini dapat di peroleh data-data yang relevan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder. Teknik Pengumpulan Data Primer adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang menjadi sumber penelitian di lapangan. Teknik yang dilakukan yaitu, Metode Observasi, Metode Wawancara (Interview), dan Teknik Dokumentasi. Teknik pengumpulan data sekunder adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data primer. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat di bagi atas sumber buku, dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.

## C. TINJAUAN LITERATUR

### Aspek Geografis dan Demografi

Kabupaten Bandung memiliki luas wilayah sebesar 176.238,67 ha, yang terdiri atas 31 Kecamatan, 267 Desa dan 9 Kelurahan. Kecamatan Pasirjambu merupakan wilayah dengan luas terbesar dan Kecamatan Margahayu merupakan wilayah dengan luas terkecil di Kabupaten Bandung. Secara geografis, Kabupaten Bandung terletak pada 6°49'-7°18' Lintang Selatan dan 107°14'-107°56' Bujur Timur. Letak geografis wilayah Kabupaten Bandung di bagian timur dan selatan cekungan Bandung yang merupakan tubir danau purba dengan tipe geologis berbentuk kandungan batuan vulkanis. Kabupaten Bandung merupakan hulu daerah aliran sungai Citarium, dengan beberapa anak sungainya, seperti sungai Citarik, Cikeruh, Cirasea, Cisangkuy, Ciwidey, dan Cimahi. Keberadaan sungai-sungai ini menguntungkan bagi masyarakat sebagai sumber air bersih, juga bagi sektor pertanian dan industri. Sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung adalah pegunungan atau daerah perbukitan dengan ketinggian 500-1.800 meter di atas permukaan laut, semakin terjal kearah selatan. Dengan ketinggian tersebut, suhu udara di Kabupaten Bandung cukup sejuk yaitu 120-210 Celcius. Pegunungan yang terdapat di Kabupaten Bandung adalah Gunung Patuha dengan tinggi 2.334 meter, Gunung Malabar dengan tinggi 2.321 meter, serta Gunung Papandayan dengan tinggi 2.262 meter

Pada tahun 2019, penduduk Kabupaten Bandung berjumlah 3.775.279 jiwa dengan angka kepadatan penduduk sekitar 2.135 jiwa/km<sup>2</sup>. Angka tersebut diperoleh berdasarkan proyeksi hasil Sensus Penduduk 2010. Pada tahun 2020, BPS melakukan pendataan kembali melalui Sensus Penduduk 2020 pada September 2020. Berdasarkan hasil SP 2020, maka diketahui jumlah penduduk Kabupaten Bandung adalah sebanyak 3.623.790 jiwa dengan kepadatan sebesar 2.056 jiwa/km<sup>2</sup>. Hasil pendataan penduduk yang menurun dari tahun-tahun sebelumnya, selain mencerminkan nilai riil pendataan kependudukan di Kabupaten Bandung yang selama ini dapat bernilai lebih rendah dari nilai proyeksi SP 2010, juga dapat mencerminkan dampak dari pandemic COVID-19 yang mengakibatkan korban jiwa dan



bermigrasinya masyarakat Kabupaten Bandung ke luar kota akibat melemahnya aktivitas perekonomian di daerah.

Penduduk Kabupaten Bandung memiliki struktur gender yang hampir seimbang antara penduduk berjenis kelamin laki-laki dan penduduk berjenis kelamin perempuan. Tahun 2020, persentase penduduk berjenis kelamin laki-laki di Kabupaten Bandung sebesar 51% dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.848.018 jiwa, sedangkan persentase penduduk berjenis kelamin perempuan sebesar 49% dengan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.775.772 jiwa. Sedangkan jika ditinjau dari struktur usia, populasi penduduk Kabupaten Bandung cenderung didominasi oleh penduduk usia produktif atau 15-64 tahun dengan dependency ratio sebesar 46% pada tahun 2020. Dengan demikian, setiap 100 penduduk produktif di Kabupaten Bandung menanggung sekitar 46 penduduk tidak produktif.

### **Potensi Pengembangan Wilayah**

Kondisi guna lahan di Kabupaten Bandung cenderung didominasi oleh kawasan budidaya dengan persentase cakupan sebesar 78,37%. Sebagian besar dari lahan budidaya tersebut merupakan lahan pertanian yang potensial dalam mendorong perekonomian Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung memiliki topografi yang bervariasi yang menyebabkan komoditas unggulan pertanian dari masing-masing wilayah juga bervariasi dan memiliki kekhasan tersendiri.

Dari segi daya saing, komoditas pertanian Kabupaten Bandung tidak hanya unggul di tingkat kabupaten, tetapi juga unggul di tingkat provinsi dan nasional. Selain itu, komoditas Kabupaten Bandung memiliki kekhasan tersendiri yang dapat dibedakan karakteristiknya dengan komoditas yang berasal dari daerah lain. Perbedaan karakteristik komoditas ini antara lain dalam hal jenis komoditas, besaran produksi serta cita rasa yang dimiliki. Beberapa komoditas pertanian khas Kabupaten Bandung yang menjadi unggulan diantaranya yaitu strawberry, kopi serta sapi perah dan produk turunannya.

Selain sektor pertanian, sektor industri pengolahan juga berkontribusi besar terhadap perekonomian Kabupaten Bandung. Aktivitas industri pengolahan pada umumnya berlangsung di lahan industri yang termasuk ke dalam kategori kawasan budidaya non pertanian. Pada tahun 2011, luas lahan industri di Kabupaten Bandung tercatat seluas 1.408,88 ha yang mencakup 711 unit industri. Industri tersebut diklasifikasikan ke dalam industri besar, menengah, dan kecil. Dari segi jenis produk yang dihasilkan, industri di Kabupaten Bandung pada dasarnya didominasi oleh industri tekstil dan produk turunannya.

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Bandung tidak hanya strategis di level internal Kabupaten Bandung, tetapi juga dianggap strategis oleh pemerintah nasional dan Provinsi Jawa Barat. Dalam level nasional, Kabupaten Bandung merupakan kawasan potensial dari sisi kepentingan ekonomi yang oleh pemerintah pusat telah ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perkotaan Cekungan Bandung. Adapun pada level Provinsi Jawa Barat, beberapa area di Kabupaten Bandung bersifat strategis ditinjau dari sudut kepentingan lingkungan hidup yang meliputi Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Hulu Sungai Citarum dan KSP Kawasan Bandung Utara. Selain strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup, beberapa area di Kabupaten Bandung juga masuk kedalam KSP dari sudut kepentingan pendayagunaan SDA, antara lain KSP Panas Bumi Kamojang, Darajat, Papandayan serta KS Panas Bumi Wayang Windu.

Sejalan dengan penetapan kawasan strategis oleh pemerintah nasional dan pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Bandung dalam RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 telah menetapkan empat kawasan di Kabupaten Bandung sebagai



Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dan Kawasan Terpadu yang dinilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Keempat kawasan tersebut antara lain meliputi KSK Agropolitan Ciwidey, KSK Agropolitan Pangalengan, Kawasan Terpadu Permukiman Tegalluar, Kawasan Terpadu Permukiman dan Industri Margaasih, serta Kawasan Terpadu Stadion Olahraga Si Jalak Harupat.

### **Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap PDRB Kabupaten Bandung selama lima tahun terakhir, PDRB Kabupaten Bandung, baik PDRB ADHB maupun ADHK, cenderung menunjukkan trend pertumbuhan positif namun mengalami penurunan di tahun 2020 yang bertepatan dengan dampak pandemi COVID-19. Rata-rata pertumbuhan PDRB ADHB dan ADHK berturut-turut sebesar 7,61% dan 4,60% per tahun. PDRB di tahun 2020, struktur perekonomian masyarakat Kabupaten Bandung didominasi oleh kontribusi sektor Industri Pengolahan sebesar 52,4%, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,83%, dan kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 7,7%

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bandung mengalami fluktuasi dari tahun 2016 hingga tahun 2019 dan mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020 akibat disrupsi pandemi COVID-19 terhadap perekonomian daerah. Kabupaten Bandung mengalami penurunan dari 6,1% di tahun 2019 dan menjadi -1,87% di tahun 2020. Di antara kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Barat, LPE Kabupaten Bandung termasuk kabupaten/kota dengan LPE kisaran menengah

Secara garis besar, dalam lima tahun terakhir inflasi di Kabupaten Bandung cenderung menurun. Hal ini dapat berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung dapat menjaga harga komoditas sehingga terjangkau maupun bahwa daya beli masyarakat cenderung menurun, terutama pada saat pandemi COVID-19 sehingga perputaran uang di Kabupaten Bandung turut menurun. Pada tahun 2020 inflasi Kabupaten Bandung tercatat sebesar 1,44% termasuk ke dalam klasifikasi inflasi ringan

Salah satu indikator yang dapat menunjukkan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Bandung dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Secara umum, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bandung pada tahun 2020 adalah sebanyak 263.600 jiwa, hal ini menunjukkan angka yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 223.210 jiwa di tahun 2019.

Tingkat pertumbuhan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bandung pada tahun 2020 mencapai 17,93%. Meski demikian, terdapat penurunan Indeks Kedalam Kemiskinan di Kabupaten Bandung, yakni mencapai 0,92 poin atau terjadi penurunan sebesar 11,54%. Selain itu, Indeks Keparahakan Kemiskinan Kabupaten Bandung cenderung mengalami fluktuasi pada tahun 2016-2019. Pada tahun 2020, nilai Indeks Keparahakan Kemiskinan Kabupaten Bandung adalah sebesar 0,17 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan antara penduduk miskin semakin rendah. Fenomena tersebut dapat disebabkan oleh disrupsi pandemi COVID-19 yang berdampak secara merata di kalangan penduduk miskin.

## Aspek Daya Saing

### 1. Indeks Pembangunan Manusia

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, IPM Kabupaten Bandung terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,59% per tahun. Tahun 2016-2017, IPM Kabupaten Bandung meningkat dengan laju pertumbuhan sebesar 0,466% dari semula 70,69 di tahun 2016 menjadi 71,02 di tahun 2017. Adapun pada tahun 2018, IPM Kabupaten Bandung berada pada kisaran 71,75, tumbuh 1,03% dari angka tahun sebelumnya. Tahun 2019 capaian IPM Kabupaten Bandung tercatat sebesar 72,41, sedangkan pada tahun 2020 nilai IPM yang tercapai adalah sebesar 72,39. Adanya tren yang cenderung meningkat untuk IPM Kabupaten Bandung di lima tahun terakhir, meski menurun di tahun 2020, menunjukkan adanya perbaikan kualitas kesejahteraan sosial penduduk. Pada tahun 2020, Kabupaten Bandung berada pada angka IPM sebesar 72,39. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi Jawa Barat sebesar 72,09 dan juga lebih tinggi dari IPM Nasional sebesar 71,94. Meski demikian, terdapat penurunan IPM Kabupaten Bandung sebesar 0,02.

Ditinjau per komponen penyusunnya, kenaikan nilai IPM Kabupaten Bandung dalam kurun lima tahun terakhir terutama didukung oleh kenaikan nilai Indeks Pengeluaran dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,34% per tahun. Adapun untuk komponen Indeks Pendidikan, pertumbuhan dalam lima tahun terakhir memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 0,89% per tahun. Sedangkan untuk Indeks Kesehatan selama lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang cenderung rendah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar

0,19% per tahun. Terlihat bahwa kontribusi terbesar dalam meningkatkan nilai IPM Kabupaten Bandung berasal dari sektor pendidikan.

### 2. Infrastruktur

Jaringan jalan yang baik memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan oertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dapat dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur yang baik dan memadai. Selama kurun waktu tahun 2016-2017 telah terjadi penurunan kualitas jalan kabupaten. Namun di tahun 2018 proporsi jalan kondisi baik mengalami peningkatan dan terus meningkat di tahun 2019. Pada tahun 2020, terdapat 659,485 km kondisi jalan baik dengan proporsi sebesar 56,84% dari keseluruhan panjang jalan kabupaten.

Jembatan berperan penting dalam menghubungkan daerah-daerah yang aksesnya terpisah oleh morfologi wilayah baik lembah maupun sungai, sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas suatu wilayah yang dapat memperlancar dan mempercepat distribusi barang dan jasa. Dengan demikian, keberadaan jembatan sekaligus akan mendukung perekonomian wilayah. Berdasarkan hasil evaluasi, selama selang tahun 2016-2020, proporsi jembatan kondisi baik di Kabupaten Bandung terus mengalami peningkatan. Di tahun 2020, proporsi jembatan kondisi baik di Kabupaten Bandung adalah sebesar 53,16%

Jaringan irigasi di Kabupaten Bandung sebagian besar berfungsi untuk mendukung sektor pertanian, khususnya pertanian lahan basah. Jaringan ini meliputi baik jaringan irigasi teknis maupun jaringan irigasi non teknis. Ditinjau berdasarkan persentasenya, jaringan irigasi di Kabupaten Bandung cenderung didominasi oleh jaringan irigasi non teknis, dengan rata-rata persentase dalam lima tahun terakhir sebesar 97,76%. Adapun untuk jaringan irigasi teknis, persentasenya hanya mencakup 2,24%. Ditinjau berdasarkan luas areal irigasi, khusus irigasi non teknis, irigasi dengan luas areal 0-25 ha pengelolaannya menjadi



kewenangan pemerintah desa, sedangkan untuk irigasi dengan luas areas >25 ha pengelolaannya menjadi kewenangan kabupaten. Dari total luas irigasi non teknis seluas 19.819,27 ha di tahun 2020, 18,77% diantaranya atau sebesar 3.720,01 ha merupakan areal irigasi non-teknis kewenangan desa. Adapun sisanya yaitu sebanyak 81,23% atau sebesar 16.099,26 ha merupakan areal irigasi non-teknis kewenangan kabupaten.

### 3. Tenaga Kerja

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan kondisi ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), pada tahun 2019 TPAK di Kabupaten Bandung mencapai angka 65,38%. Angka TPAK tahun 2019 ini mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya dimana TPAK Kabupaten Bandung sebesar 61,89% pada tahun 2018, setelah sebelumnya terjadi penurunan TPAK tahun 2017-2018. Namun pada Tahun 2020 mengalami penurunan yang diakibatkan dampak pandemic covid 19. TPAK Kabupaten Bandung tahun 2020 mencapai 62,20%.

Pada tahun 2019 dan 2020, jumlah pencari kerja di Kabupaten Bandung mengalami peningkatan yang signifikan. Sebagian besar pencari kerja di tahun 2020 adalah pencari kerja laki-laki, yakni sebanyak 4.291 orang, dengan mayoritas tingkat pendidikan terakhirnya adalah lulusan SMK mencapai 6.181 orang dari jumlah total pencari kerja sebanyak 8.194 orang.

Indikator lain yang dapat menggambarkan kondisi ketenagakerjaan adalah indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Berdasarkan data Sakernas, dalam lima tahun terakhir tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bandung terus mengalami peningkatan, yakni mencapai 8,58% di tahun 2020.

### 4. Investasi

Pemerintah Kabupaten Bandung telah melakukan berbagai upaya untuk menarik investasi atau penanam modal baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Terlihat dari selang tahun 2016 hingga 2020, jumlah investor yang melakukan penanaman modal di Kabupaten Bandung terus meningkat. Meskipun dalam kondisi pandemi di tahun 2020, jumlah investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih di atas 6.000 investor dan Penanaman Modal Asing (PMA) justru meningkat dari 103 investor di tahun 2019 menjadi 154 investor di tahun 2020.

Dilihat dari realisasi investasi di Kabupaten Bandung dalam kurun lima tahun terakhir cenderung meningkat. Ditinjau dari jumlah proyek, tahun 2020 proyek PMDN di Kabupaten Bandung berjumlah 6.010 proyek. Jumlah ini menurun jika dibandingkan jumlah proyek PMDN pada tahun sebelumnya yang mencapai 6.992 proyek. Meski demikian, hal ini berbeda dengan realisasi jumlah proyek PMA. Pada tahun 2020, sektor PMA Kabupaten Bandung mengalami peningkatan sebanyak 51 proyek. Hal ini mengindikasikan bahwa meski jumlah proyek PMDN dan PMA menurun, iklim investasi asing di Kabupaten Bandung masih kuat. Ditinjau dari segi nilai realisasi investasi, nilai realisasi investasi PMDN terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2020. Meski demikian, nilai realisasi investasi PMA cenderung fluktuatif dan menurun dari tahun 2019 ke 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun jumlah PMA meningkat, nilai realisasi setiap investasi PMA tersebut cenderung dalam jumlah yang lebih sedikit. Adapun secara keseluruhan nilai realisasi investasi di Kabupaten Bandung cenderung meningkat dari tahun 2016 hingga 2020, yakni mencapai Rp. 26.300.207.834.856.



## 5. Koperasi dan UMKM

Penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Bandung mencerminkan kinerja yang fluktuatif namun cenderung menguat pada periode 2016-2019. Hal ini ditandai diantaranya dengan meningkatnya persentase koperasi aktif. Namun bila ditinjau berdasarkan jumlah koperasi aktif cenderung menurun. Terlebih lagi, pada tahun 2020, disrupsi pandemi covid-19 mengakibatkan terbatasnya aktivitas perekonomian masyarakat dan melemahnya usaha koperasi dan UKM di Kabupaten Bandung. Akan tetapi, meski secara umum jumlah koperasi menurun, namun pada tahun 2020 jumlah pelaku UKM meningkat.

Dalam kurun lima tahun terakhir omzet koperasi dan UMKM di Kabupaten Bandung cenderung mengalami peningkatan namun mengalami penurunan di tahun 2020. Meski demikian, omzet di tahun 2020 yang masih lebih tinggi dibandingkan omzet tahun 2017 ini menunjukkan bahwa koperasi dan UMKM di Kabupaten Bandung memiliki potensi resiliensi terhadap disrupsi pandemi.

## 6. Perdagangan dan Perindustrian

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor dengan kontribusi tertinggi terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Selama kurun lima tahun terakhir, sektor perdagangan, hotel dan restoran menjadi sektor paling besar ketiga setelah sektor industri dan pertanian. Jumlah nilai ekspor barang dan jasa (US\$) mengalami terus meningkat dari tahun 2016 sebesar US\$ 824.819.145 menjadi US\$ 897.710.575 pada tahun 2017 dan menjadi US\$ 1.028.957.434,14 pada tahun 2018. Akan tetapi terjadi penurunan di tahun 2019 dan 2020, yakni masing-masing senilai US\$948.614.175,00 dan US\$726.705.758. Penurunan nilai ekspor barang dan jasa ini mengindikasikan salah satu dampak disrupsi pandemi COVID-19 di Kabupaten Bandung.

Sektor industri di Kabupaten Bandung mempunyai kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Bandung, terutama industri olahan. Industri kecil formal dan non formal di tahun 2018 berjumlah 9.233 unit. Terdapat juga 346 unit industri menengah dan 140 unit industri besar. Angka tersebut terus meningkat di tahun 2020 dengan jumlah industri kecil formal dan non formal di Kabupaten Bandung berjumlah 12.184 unit, jumlah industri menengah mencapai 902 unit, dan terdapat peningkatan jumlah industri besar menjadi 143 unit.

## 7. Potensi Unggulan Daerah

Produktivitas komoditas padi cenderung fluktuatif pada tahun 2016-2020. Meski demikian, di kala pandemi produktivitas komoditas padi justru cenderung meningkat dari tahun 2019, yakni dari 63,52 menjadi 63,54 di tahun 2020. Peningkatan juga terus terjadi dengan pencapaian indeks pertanaman yang mencapai 2,76 di tahun 2020. Meski demikian, terdapat variasi pada masing-masing luas areal pengembangan hortikultura unggulan dan jumlah rata-rata pencapaian produktivitas hortikultura.

Dalam kurun lima tahun terakhir, status kesehatan hewan cenderung fluktuatif. Tahun 2020 tercatat status kesehatan hewan adalah 72%, yakni turun dari 75,33% di tahun 2019. Berkurangnya status kesehatan hewan, kelompok ternak yang terbina, pelaku usaha pengolahan ternak yang bersertifikat, jumlah peternak yang memanfaatkan teknologi dan sarana dan prasarana di rumah potong hewan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa produktivitas sektor peternakan di Kabupaten Bandung terdampak secara signifikan oleh adanya disrupsi pandemi COVID-19.

Kabupaten Bandung banyak memiliki area dengan panorama alam yang menjadi daya tarik wisata, terutama di area yang berlokasi di selatan dan utara Kabupaten Bandung.



Disamping kawasan pariwisata alam, Kabupaten Bandung juga kaya akan kawasan wisata budaya. Beberapa objek wisata yang ada di Kabupaten Bandung antara lain Situ Cileunca, Situ Patengan, Kolam Air Panas Alami Walini, Kolam Air Panas Alami Cimanggu, Kolam Air Panas Alami Cibolang, Perkemahan Rancaupas, Tebing Keraton, Curug Cinulang. Banyaknya objek wisata di Kabupaten Bandung membangkitkan perekonomian Kabupaten Bandung. Dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisata antara lain menumbuhkan sektor perdagangan, hotel dan restoran serta peningkatan terhadap mitra kerja pariwisata.

### **8. Ketersediaan Energi dan Sumber Daya Mineral**

Potensi energi di Kabupaten Bandung terdiri dari panas bumi (geothermal), mikrohidro, biogas (limbah ternak), bahan bakar nabati (limbah organik) dan tenaga surya (PLTS). Terdapat 5 wilayah pengembangan yaitu wilayah Kamojang, Wayang Windu, Patuha, Cibuni, dan Darajat. Perolehan DBH panas bumi Kabupaten Bandung Tahun 2013 sebesar Rp.51.718.860.646, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar Rp.105.298.055.081,55, dan tahun 2011 sebesar Rp.53.860.362.127,-. Pada tahun 2015, jumlah rumah tangga di Kabupaten Bandung yang menggunakan listrik PLN sebanyak 731.428 KK atau sekitar 82,86 % dari total jumlah KK. Pemenuhan listrik penduduk Kabupaten Bandung, disamping dipenuhi oleh listrik PLN juga dipenuhi oleh tenaga mikro hidro. Tahun 2014 tercatat jumlah pengguna energi mikro hidro di Kabupaten Bandung sebanyak 34 KK (Desa Sugihmukti Kecamatan Pasirjambu) dan pengguna energi surya sebanyak 150 KK masing-masing sebanyak 50 KK yang terletak di Desa Mandalawangi Kecamatan Nagreg, Desa Sukaluyu Kecamatan Pangalengan, dan Desa Sugihmukti Kecamatan Pasirjambu. Minyak dan gas bumi di Kabupaten Bandung umumnya bergerak di kegiatan hilir yaitu SPBU sebanyak 50 unit usaha dan agen LPG sebanyak 52 agen.

Potensi sumber daya mineral di Kabupaten Bandung dapat dikelompokkan menjadi sumber daya pertambangan dan sumber daya air tanah. Keberadaan sumber daya mineral di Kabupaten Bandung berupa andesit, tanah urug, dan emas yang tersebar di Kecamatan Margaasih, Baleendah, Nagreg, Kutawaringin, Pameungpeuk, dan Banjaran dengan jumlah perusahaan yang melaksanakan produksi sebanyak 22 perusahaan dengan luas lahan 119,17 ha. Dari jumlah tersebut, hanya 15 perusahaan yang aktif.

Potensi bahan galian yang ada di Kabupaten Bandung selain andesit dan tanah urug juga terdapat potensi emas yang sebagian besar berada di Kecamatan Kutawaringin. Kondisi pengelolaan potensi ini adalah masih dilakukan dengan pertambangan rakyat. Pengelolaan oleh perusahaan bahan galian di Kabupaten Bandung dilakukan dengan mengedepankan konservasi dan penggalan potensi untuk peningkatan PAD. Untuk pengendalian dan pembinaan dilakukan dengan perijinan yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Pada tahun 2014 jumlah luasan pertambangan berijin sebesar 91,56%. Kabupaten Bandung sebagai bagian dari cekungan air tanah Bandung-Soreang mengikuti prinsip pengelolaan 'one basin one management'. Menurut hasil penelitian dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral disebutkan bahwa potensi jumlah air tanah yang terkandung dalam cekungan air tanah Bandung-Soreang adalah 368,5 juta m<sup>3</sup>/tahun. Dari jumlah total tersebut diperkirakan kebutuhan air di wilayah cekungan Bandung-Soreang yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut adalah sebesar 312,75 juta m<sup>3</sup>.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tantangan dan Peluang

Tema Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022-2026 adalah Pengembangan Agro Bedas (Agropolitan Berkelanjutan dan Sejahtera) Berbasis IPTEKIN, dan untuk mendukung tema tersebut maka perlu dilakukan pemetaan tantangan/hambatan yang dihadapi dan peluang dalam mewujudkan tema tersebut. Pengembangan Agro Bedas (Agropolitan Berkelanjutan dan Sejahtera) Berbasis IPTEKIN di Kabupaten Bandung telah dituangkan dalam berbagai kebijakan perencanaan pembangunan. Dengan demikian diharapkan dalam pengembangannya akan didukung oleh berbagai pihak, selain pemerintah Kabupaten Bandung juga diharapkan adanya keterlibatan stakeholder lainnya yang terkait erat dengan pengembangan agropolitan di Kabupaten Bandung. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi:

#### 1. RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036.

Kebijakan Pengembangan Agropolitan di Kabupaten Bandung telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036. Ada 4 (empat) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dan 3 (tiga) Kawasan Terpadu yang dinilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung. Keempat kawasan tersebut meliputi Kawasan Agropolitan di Kecamatan Pasirjambu-Kecamatan Ciwidey-Kecamatan Rancabali dan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Pangalengan. Selain itu terdapat 3 (tiga) kawasan terpadu di Kabupaten Bandung yaitu Kawasan Terpadu Tegalluar, Kawasan Terpadu Permukiman dan Industri Margaasih, serta Kawasan Terpadu Sekitar Stadion Olah Raga Si Jalak Harupat. Pengembangan kawasan agropolitan difokuskan pada Kecamatan Pasirjambu, Ciwidey, dan Rancabali serta Pangalengan. Keberadaan kawasan ini berupa sentra pertanian lahan basah dan hortikultura yang dapat dijadikan sebagai kawasan agrowisata, industri rumah tangga skala UKM dan pendidikan untuk pengenalan bentuk dan jenis tanaman pangan, sayuran serta buah-buahan serta untuk mengetahui tentang teknik pengelolaannya. Diharapkan kawasan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat sekitar maupun pertumbuhan ekonomi kabupaten melalui potensi pertanian yang dimiliki. Selain itu, khusus untuk Kawasan Agropolitan Pangalengan diarahkan juga untuk mengembangkan kegiatan jasa yang mendukung kegiatan wisata berkelanjutan. Hal ini tidak lepas dari keberadaan pusat pertumbuhan Rancabuaya yang termasuk ke dalam Kawasan Strategis Metropolitan Jawa Barat yang akan menambah potensi pergerakan manusia dalam koridor Bandung - Rancabuaya melewati Kawasan Agropolitan Pangalengan yang akan berdampak pada pertumbuhan kegiatan di sekitar koridor tersebut.

#### 2. Arah Kebijakan RPJMD Tahap IV (Tahun 2021-2025)

Dalam arah kebijakan RPJMD Tahap IV yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025, diarahkan agar pengembangan Agroindustri berbasis sumber daya lokal dan dikelola oleh masyarakat lokal melalui korporasi pertanian yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi sektor pertanian.

### Strategi Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Berikut ini adalah strategi yang perlu dilakukan dalam rangka Penguatan SIDA berdasarkan kondisi, peluang dan tantangan serta strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam rancangan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 yaitu:



1. Penguatan Kebijakan Sistem Inovasi Daerah.  
Strategi ini dimaksudkan untuk memperkuat pilar-pilar bagi penumbuhkembangan inovasi, baik dalam kerangka kebijakan daerah dengan memasukan program Penguatan SIDA ke dalam RPJMD dan RKPD, dan juga bagaimana memperkuat peran kelembagaan litbang dalam mendukung Sistem Inovasi Daerah.
2. Pengembangan klaster industri.  
Strategi ini bertujuan untuk mengembangkan potensi terbaik dan meningkatkan daya saing klaster industri unggulan daerah.
3. Pengembangan jaringan inovasi.  
Strategi ini sebagai wahana untuk membangun keterkaitan dan kemitraan antar aktor, serta mendinamisasikan aliran pengetahuan, inovasi, difusi dan pembelajaran.
4. Pengembangan technopreneur.  
Strategi ini sebagai wahana modernisasi bisnis/ekonomi dan sosial, serta pengembangan sumber daya manusia melalui penumbuhan wirausaha baru berbasis IPTEK
5. Pengembangan pilar-pilar kebijakan SIDA.  
Strategi ini bertujuan memperbaiki elemen-elemen penguatan sistem yang ada, melakukan harmonisasi dan fasilitasi agar SIDA dapat terus berlanjut.

Secara umum, strategi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Bandung ditempuh melalui 5 (lima) Pilar SIDA yaitu:

1. Pilar Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah.  
Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja inovasi, difusi dan pembelajaran di Kabupaten Bandung secara bersistem (sistemik dan sistematis) dalam konteks makro sebagai bagian dari pembangunan daerah. Hal ini dilakukan melalui pendekatan:
  - a. Kerangka Kebijakan Inovasi (innovation policy framework) sebagai pijakan strategis penguatan sistem inovasi daerah dalam jangka panjang.
  - b. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah penguatan sistem inovasi daerah
  - c. Implementasi operasional secara bertahap untuk mencapai tujuan dan sasaran spesifik penguatan sistem inovasi daerah.
2. Pilar Pengembangan Kawasan Agropolitan  
Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja inovasi, difusi dan pembelajaran di daerah secara bersistem (sistemik dan sistematis) dalam pengembangan Agropolitan berbasis IPTEKIN sebagai bagian dari pembangunan daerah. Hal ini dilakukan melalui pendekatan:
  - a. Kerangka Kebijakan Inovasi (innovation policy framework) sebagai pijakan strategis pengembangan Agropolitan berbasis IPTEKIN.
  - b. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah pengembangan Agropolitan berbasis IPTEKIN.
  - c. Implementasi operasional secara bertahap untuk mencapai tujuan dan sasaran spesifik pengembangan Agropolitan berbasis IPTEKIN.
3. Pilar Pengembangan Jaringan Inovasi  
Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja inovasi, difusi dan pembelajaran di daerah secara bersistem (sistemik dan sistematis) dalam konteks penguatan kemitraan/kolaborasi, dinamika interaksi, aliran pengetahuan/inovasi, dan manajemen pengetahuan (knowledge management) dalam mendukung



- pengembangan Agropolitan berbasis IPTEKIN sebagai bagian dari pembangunan daerah. Hal ini dilakukan melalui pendekatan :
- a. Kerangka Kebijakan Inovasi (innovation policy framework) sebagai pijakan strategis pengembangan jaringan inovasi daerah dalam mendukung pengembangan Agropolitan berbasis IPTEKIN.
  - b. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah pengembangan jaringan inovasi daerah dalam mendukung pengembangan Agropolitan berbasis IPTEKIN.
  - c. Implementasi operasional secara bertahap untuk mencapai tujuan dan sasaran spesifik pengembangan jaringan inovasi daerah dalam mendukung pengembangan Agropolitan berbasis IPTEKIN.
4. Pilar Pengembangan Technopreneur
- Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja inovasi, difusi dan pembelajaran di daerah secara bersistem (sistemik dan sistematis) dalam konteks pengembangan technopreneur di Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang inovatif dalam mendukung pengembangan Agropolitan berbasis IPTEKIN sebagai bagian dari pembangunan daerah. Hal ini dilakukan melalui pendekatan:
- a. Kerangka Kebijakan Inovasi (innovation policy framework) sebagai pijakan strategis pengembangan technopreneur daerah dalam mendukung pengembangan Agropolitan berbasis IPTEKIN.
  - b. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah pengembangan technopreneur daerah dalam mendukung pengembangan Agropolitan berbasis IPTEKIN.
  - c. Implementasi operasional secara bertahap untuk mencapai tujuan dan sasaran spesifik pengembangan technopreneur daerah dalam mendukung pengembangan Agropolitan berbasis IPTEKIN.
5. Pilar Pengembangan Kebijakan Tematik
- Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan implementasi teknologi bagi kepentingan publik serta memperbaiki elemen-elemen penguatan sistem yang bersifat tematik sebagai bagian dari pembangunan daerah. Hal ini dilakukan melalui pendekatan:
- a. Kerangka Kebijakan Inovasi sebagai pijakan strategis pengembangan tematik dalam jangka panjang.
  - b. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah pengembangan tematik.
  - c. Implementasi operasional secara bertahap untuk mencapai tujuan dan sasaran spesifik pengembangan tematik.

### **Arah Kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah**

Arah kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran penguatan Sistem Inovasi Daerah. Arah kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah sebagai berikut:

1. Mengembangkan kerangka dasar kebijakan inovasi daerah. Tujuan utama arah kebijakan ini adalah mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi perkembangan inovasi.
2. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek, mengembangkan kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah.
3. Menumbuhkembangkan kolaborasi dan meningkatkan difusi inovasi. Tujuan utama arah kebijakan ini adalah mendorong interaksi produktif multipihak yang saling



menguntungkan bagi perkembangan inovasi dan difusinya, penyebarluasan praktik baik dan hasil-hasil litbang yang sesuai dengan potensi terbaik daerah.

4. Membangun budaya inovasi. Tujuan utama arah kebijakan ini adalah membangun landasan budaya kreatif-inovatif dan kewirausahaan, menumbuhkembangkan perusahaan-perusahaan baru (pemula) yang inovatif, serta memperkuat kohesi sosial di daerah.
5. Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dalam kawasan Agropolitan. Tujuan utama arah kebijakan ini adalah mendorong investasi dan aktivitas dalam sistem inovasi, saling melengkapi dan memperkuat rantai nilai dalam mendukung pengembangan Agropolitan berbasis IPTEKIN.
6. Penyelarasan dengan perkembangan global. Tujuan utama arah kebijakan ini adalah meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kesiapan pemangku kepentingan di daerah agar semakin memahami dan menguasai perkembangan global untuk dimanfaatkan bagi kepentingan dan kemajuan daerah.

Dalam upaya Penguatan Sistem Inovasi di Kabupaten Bandung, arah kebijakan dirumuskan dalam Kerangka Kebijakan Inovasi (KKI) sebagai berikut:

1. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis.  
Tujuan utama kebijakan ini adalah mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi perkembangan inovasi. Adapun cakupan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis antara lain meliputi:
  - a. Dokumen perencanaan daerah yang memuat penguatan sistem inovasi daerah
  - b. Basis Data Inovasi dan Bisnis, meliputi seluruh data untuk meningkatkan kapasitas inovasi dan bisnis.
  - c. Peraturan yang mendukung inovasi dan bisnis, mencakup seluruh regulasi untuk mendukung inovasi dan bisnis secara berkelanjutan.
  - d. Infrastruktur Dasar Inovasi dan Bisnis, mencakup seluruh infrastruktur yang mendukung inovasi dan bisnis.
  - e. Insentif Inovasi dan Bisnis, mencakup pemberian insentif untuk inovasi dan bisnis. Hal ini dapat merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.
2. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung Iptek/Litbangyasa dan mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri, khususnya UMKM dan IKM.  
Tujuan utama kebijakan ini adalah mengembangkan atau memperkuat unsur-unsur lembaga/organisasi agar berfungsi tepat bagi pemajuan sistem inovasi di Kabupaten Bandung, meningkatkan daya ungkit peran iptek yang sesuai dan spesifik bagi Kabupaten Bandung, serta meningkatkan kemampuan industri, khususnya UMKM dan IKM, dalam mengakses dan memanfaatkan pengetahuan dan hasil iptek serta mengembangkannya. Cakupan kelembagaan dan daya dukung iptek serta kemampuan absorpsi industri, khususnya UMKM dan IKM antara lain meliputi:
  - a. Kelembagaan Sistem Inovasi Daerah, meliputi Tim Koordinasi SIDA, Perguruan Tinggi, serta seluruh lembaga penelitian, pengembangan dan rekayasa (litbangyasa) yang terdapat di Kabupaten Bandung.
  - b. Daya Dukung Iptek, mencakup seluruh sumber daya iptek.
  - c. Daya Absorpsi Industri, mencakup seluruh kapasitas daya absorpsi industri, khususnya UMKM dan IKM.
3. Menumbuhkembangkan kolaborasi dan meningkatkan difusi inovasi, dan meningkatkan pelayanan berbasis teknologi.



Tujuan utama kebijakan ini adalah mendorong interaksi produktif multipihak yang saling menguntungkan bagi perkembangan inovasi dan difusinya, penyebarluasan praktik baik dan hasil-hasil litbangyasa yang sesuai dengan potensi terbaik Kabupaten Bandung, melalui:

- a. Membentuk Jaringan Sistem Inovasi Daerah dengan tujuan untuk menumbuhkan lembaga dan program yang strategis dan inovatif.
  - b. Peningkatan difusi inovasi dengan tujuan untuk meningkatkan difusi hasil-hasil inovasi (praktik baik, pengetahuan, kepakaran) dan alih inovasi.
  - c. Pelayanan berbasis teknologi untuk memberikan pelayanan teknologi untuk peningkatan kapasitas adopter.
4. Mendorong budaya inovasi.

Tujuan utama kebijakan ini adalah membangun landasan budaya kreatif-inovatif dan kewirausahaan, menumbuhkembangkan perusahaan-perusahaan baru (pemula) yang inovatif, serta memperkuat kohesi sosial di Kabupaten Bandung, melalui :

- a. Penguatan Budaya Inovasi melalui jalur pendidikan dan pelatihan inovasi : Meningkatkan budaya inovasi melalui jalur pendidikan dan pelatihan (kewirausahaan, keinovasian, peningkatan kapasitas sumber daya aparat).
  - b. Penguatan Kohesi Sosial melalui inventarisasi, dokumentasi dan sosialisasi teknologi-inovasi masyarakat (kearifan lokal)serta komponen modal sosial lainnya yang dimiliki Kabupaten Bandung sebagai sumber inovasi
  - c. Apresiasi dan Kampanye Inovasi, memberikan apresiasi terhadap karya yang inovatif dan terus mengkampanyekan budaya inovasi di wilayahnya.
  - d. Penumbuhan usaha baru yang inovatif melalui pemberian insentif.
5. Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah.

Tujuan utama kebijakan ini adalah mendorong investasi dan aktivitas dalam sistem inovasi, saling melengkapi dan memperkuat rantai nilai dalam kawasan spesifik, meliputi:

- a. Prakarsa Klaster Industri Spesifik Daerah dan/atau Prakarsa Sistem Inovasi untuk memperlihatkan perkembangan aktor bisnis dan non-bisnis dalam suatu jaringan atau klaster industri.
  - b. Koordinasi Kebijakan Daerah dan Daerah-Nasional untuk menunjukkan ada atau tidaknya mekanisme koordinasi yang lebih terbuka dan dapat memacu sistem inovasi dan klaster industri.
  - c. Pengembangan/Penguatan Kelembagaan Khusus untuk menggambarkan sejauhmana terbangunnya lembaga khusus untuk mempercepat proses terjadinya kolaborasi inovatif.
6. Penyelarasan dengan perkembangan global.

Tujuan utama kebijakan ini adalah meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kesiapan pemangku kepentingan di Kabupaten Bandung agar semakin dapat memahami dan menguasai perkembangan global untuk dimanfaatkan bagi kepentingan dan kemajuan Kabupaten Bandung, mencakup:

- a. Prakarsa dan respon terhadap isu lingkungan yang telah diprogramkan.
- b. Program Kabupaten Bandung dalam meningkatkan kapasitas masyarakat tentang Kekayaan Intelektual.



## E. PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Tema Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022-2026 adalah Pengembangan Agro Bedas (Agropolitan Berkelanjutan dan Sejahtera) Berbasis IPTEKIN. Pengembangan Agro Bedas (Agropolitan Berkelanjutan dan Sejahtera) Berbasis IPTEKIN di Kabupaten Bandung telah dituangkan dalam berbagai kebijakan perencanaan pembangunan. Dengan demikian diharapkan dalam pengembangannya akan didukung oleh berbagai pihak, selain pemerintah Kabupaten Bandung juga diharapkan adanya keterlibatan stakeholder lainnya yang terkait erat dengan pengembangan agropolitan di Kabupaten Bandung.

### Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, untuk terwujudnya strategi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Bandung ditempuh melalui 5 (lima) Pilar SIDa, sehingga direkomendasikan sebagai berikut:

1. Pilar Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah.  
Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja inovasi, difusi dan pembelajaran di Kabupaten Bandung secara bersistem (sistemik dan sistematis) dalam konteks makro sebagai bagian dari pembangunan daerah.
2. Pilar Pengembangan Kawasan Agropolitan  
Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja inovasi, difusi dan pembelajaran di daerah secara bersistem (sistemik dan sistematis) dalam pengembangan Agropolitan berbasis IPTEKIN sebagai bagian dari pembangunan daerah.
3. Pilar Pengembangan Jaringan Inovasi  
Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja inovasi, difusi dan pembelajaran di daerah secara bersistem (sistemik dan sistematis) dalam konteks penguatan kemitraan/kolaborasi, dinamika interaksi, aliran pengetahuan/inovasi, dan manajemen pengetahuan (knowledge management) dalam mendukung pengembangan Agropolitan berbasis IPTEKIN sebagai bagian dari pembangunan daerah.
4. Pilar Pengembangan Technopreneur  
Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja inovasi, difusi dan pembelajaran di daerah secara bersistem (sistemik dan sistematis) dalam konteks pengembangan technopreneur di Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang inovatif dalam mendukung pengembangan Agropolitan berbasis IPTEKIN sebagai bagian dari pembangunan daerah.
5. Pilar Pengembangan Kebijakan Tematik.  
Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan implementasi teknologi bagi kepentingan publik serta memperbaiki elemen-elemen penguatan sistem yang bersifat tematik sebagai bagian dari pembangunan daerah.

## REFERENSI

- Taufik, T.A. 2005. Pengembangan Sistem Inovasi Daerah: Perspektif Kebijakan. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Kementerian Riset dan Teknologi. ISBN No 979-9344-18-2.





- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
- Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 Tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025